

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN PERPAJAKAN DI WEARNES EDUCATION CENTER BERDASARKAN NILAI BUDI PEKERTI KI HADJAR DEWANTARA**

*Sastra Herdjendrajuningrat Pangruwating Dyu. Ilmu yang luhur akan menyelamatkan dunia serla melenyapkan kebiadaban.*  
(Ki Hadjar Dewantara,2016;86)

#### **4.1 Pengantar**

Sebagai seorang putra bangsa yang peduli dengan dunia pendidikan, Ki Hadjar Dewantara memiliki budi pekerti dan kecerdasan intelektual yang menjadikannya suri tauladan, sosok yang dihargai dan dihormati anak didik, teman bahkan beberapa petinggi Negara Belanda. Tulisan-tulisan beliau mencerminkan seorang putra bangsa yang berbudi luhur. Menurut beliau, Budi pekerti, merupakan tindakan yang selalu memikir-mikirkan, merasa-rasakan dan berkehendak dengan timbangan kesucian moril, bahwa segala tingkah laku manusia harus senantiasa beradab itu selalu terlihat tertib, sopan, teratur, halus. Budi pekerti yang baik dapat membawa kita menjadi pribadi yang tertib, sopan dan halus perangnya. Budi pekerti yang baik yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban.

Dalam bab ini, penulis menyajikan struktur penulisan yang sesuai dengan tahapan penelitian, yaitu untuk yang pertama, penulis akan menggali realitas pendidikan perpajakan terkait dengan nilai budi pekerti, yang kedua tahap menelaah kritis atas temuan realitas pada tahapan pertama, dan yang ketiga merupakan tahap rekonstruksi pendidikan perpajakan dalam bingkai indikator budi pekerti Ki Hadjar Dewantara. Berbagai informasi tambahan yang berkaitan dengan nilai budi pekerti Ki Hadjar Dewantara akan penulis tambahkan sebagai justifikasi pemaknaan nilai-nilai pemikiran yang saya refleksikan dari tulisan-tulisan dari pemikiran beliau.

#### 4.2 Realitas Pendidikan Perpajakan Terkait Nilai Budi Pekerti

Dalam kehidupannya, meskipun beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang harus bertempur melawan penjajah, namun beliau bukan orang yang memiliki watak keras hati. Ki Hadjar Dewantara selalu mengedepankan nilai perdamaian dalam upaya untuk melawan setiap bentuk penjajahan. Hal ini diterapkan dalam berbagai perundingan, diplomasi, serta dalam memprakarsai organisasi politik maupun sekolah partikelir yang selama ini menjadi jalan perjuangan beliau dalam melawan penjajahan.

Dalam prakteknya, Ki Hadjar Dewantara senantiasa menekankan arti penting dari keluhuran budi pekerti sebagai salah satu nilai yang perlu ditanamkan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Bahkan saat berada di luar proses pendidikanpun, beliau senantiasa memberikan contoh bagaimana menjadi seseorang yang memiliki budi pekerti luhur. Beliau menjadi dekat dengan peserta didik karena sifat keteladanan yang dimiliki, baik itu sebagai guru, sebagai orangtua ketika berada di sekolah maupun sebagai teman saat berdiskusi tentang pendidikan. Maka tidak heran jika beliau memprakarsai suatu semboyan yang patut di banggakan yaitu, *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani*.

Dalam konteks penelitian ini, terkait dengan nilai budi pekerti dalam proses pendidikan, Bapak BB sebagai salah satu informan menjelaskan sebagai berikut..

“Nilai budi pekerti dalam jiwa seseorang akan mampu melahirkan jiwa toleransi, saling menolong dan senantiasa berkeinginan untuk berbuat kebajikan. Hal ini penting ditanamkan pada anak didik termasuk di Wearnas Education Center ”

Dalam konteks pendidikan pajak, nilai budi pekerti menjadi sangat penting karena keberadaan pajak itu sendiri untuk kepentingan bersama dan menjadi tonggak dari negara ini dalam hal pembangunan. Dalam bidang pendidikan

perpajakan, intervensi budi pekerti menurut saya memang terkesan kurang. Hampir dalam semua jenjang pendidikan nilai-nilai itu seperti terpaksa direkatkan, jadi sifatnya hanya formalitas saja tanpa memiliki ruh. Pembelajaran perpajakan hanya bersifat teknis kurang menyentuh kepada *mindset* akan arti pentingnya pajak. Hal ini bisa dijadikan alasan yang mampu melemahkan pajak di mata warga negara sehingga pajak dianggap hanya membebani masyarakat, pemahaman pendidikan perpajakan tidak diberikan secara utuh, hal ini tentu sangat disayangkan.

Pemikiran saya, senada dengan Bapak BB yang menyampaikan pendapat bahwa:

“Pajak mendidik orang mampu memiliki jiwa toleransi, penolong terhadap semua warga negara, karena didalam membangun negara agar kehidupan masyarakat adil dan makmur butuh bantuan atau kerjasama dari golongan orang-orang kaya, karena pajak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang memiliki kekayaan berlebih untuk disumbangkan kepada negara, sedangkan si miskin yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”.

Dari penjelasan Bapak BB tersebut, saya sepaham dengan beliau bahwa jika nilai budi pekerti memiliki dampak yang begitu luar biasa dalam konteks perpajakan. Secara komprehensif memberi banyak sekali keuntungan bagi perkembangan negara ini.

Senada dengan Bapak BB, Bapak HR juga menjelaskan :

“....keberadaan budi pekerti dalam pendidikan pajak akan memberi pelajaran bagaimana anak didik belajar konsekwen dengan diri sendiri, siap menghadapi resiko dan siap membentengi diri dari hal-hal yang kurang terpuji. Jika nilai budi pekerti ditanamkan dalam proses pendidikan Pajak di Wearnes, saya yakin hasilnya pasti akan lebih baik, out put nya akan semakin berkualitas sesuai kebutuhan jaman”.

Pendapat yang diberikan para informan tersebut menurut saya bisa menjadi sumber data di lapangan mengenai begitu vitalnya nilai budi pekerti dalam pendidikan perpajakan, dan semua ini akan menjadi sia-sia jika penerapannya hanya sekedar lipstik. Selama ini penerapan etika pajak dalam

kurikulum pendidikan tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI mungkin mampu menjadi pertimbangan. Hasil kajian tersebut membuktikan bahwa kalangan generasi muda belum sepenuhnya memahami urgensi pemungutan pajak. Bahkan lebih mencengangkan lagi banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami bahwa penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan kondisi inilah perlu adanya pembahasan lebih rinci mengenai perpajakan. Kecenderungan sistem pengajaran di Indonesia selama ini lebih banyak mengandalkan kepada aspek pengetahuan atau pemahaman saja atau kognitif tanpa ada aspek afektif atas materi tersebut. Apakah penerapan pajak juga ingin seperti ini yang hanya manis dalam teorinya tetapi tak ada aksi di lapangannya.

Inilah yang perlu dipikirkan lagi dalam substansi pendidikan pajak. Kekakuan dalam sistem pendidikan kita seringkali menolak update ini karena kegiatan pembaruan kurikulum bukanlah kerja tahunan dan coba-coba saja sehingga mudah untuk diutak atik. Belum lagi dengan dilema kemampuan tenaga pengajar yang bisa dikatakan belum memiliki pemahaman dan kompetensi di bidang perpajakan. Fleksibilitas budi pekerti dalam materi perpajakan harus menyesuaikan dengan kakunya sistem pendidikan ini dengan menyertakan budi pekerti yang merupakan instrumen dalam etika profesi yang membungkus materi perpajakan.

#### **4.3 Telaah Kritis Realitas Pendidikan Perpajakan Terkait Nilai Budi Pekerti Ki Hadjar Dewantara**

Selama ini, dalam proses belajar mengajar, nilai budi pekerti yang diberikan di Wearnes Education Center menurut saya hanya sebatas lipstik saja.

Artinya secara implisit dan eksplisit nilai budi pekerti hampir tidak ada sama sekali. Bahkan ada beberapa pengajar yang tersenyum sinis saat saya menanyakan hal ini secara lesan. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, kalau pengajarnya saja *undre estimate* dengan nilai-nilai kebaikan, bagaimana anak didik akan memahaminya. Kondisi ini yang bagi saya cukup memprihatinkan, karena di lembaga pendidikan profesi 1 tahun, tidak tersentuh nilai budi pekerti sama sekali, terutama dalam materi pajak. Orientasi mengerikan yang muncul adalah “ yang penting anak didik bisa menghitung pajak dan bisa memanipulasi pajak sehingga perusahaan untung dan karyawan tersebut bisa bekerja terus di perusahaan itu”.

Nah, kalau dibiarkan, kondisi memprihatinkan ini akan terus terjadi yaitu anak didik melakukan pelanggaran etika tanpa rasa bersalah, bisa saja dia berkata; “gak pa pa manipulasi, yang penting aku dipakai terus di perusahaan ini”.pemikiran instan yang muncul tanpa memikirkan resikonya di hari nanti dan tidak memiliki rasa toleransi, bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan di negeri ini”.

Sebagai penulis saya yakin, kondisi ini tidak hanya terjadi di wearnes namun juga di lembaga pendidikan profesi yang menganggap kurang begitu penting nilai budi pekerti, sehingga kalau nilai-nilai itu masuk dalam materi pembelajaran terkesan hanya membuang-buang waktu dan biaya, dan yang terpenting adalah mereka bisa menyelesaikan materi dengan baik dengan nilai yang bagus. Hal ini tentu saja jauh dari makna pendidikan itu sendiri.

Ki hadjar Dewantara mengungkapkan:

“Pendidikan merupakan tuntunan di dalam kehidupan. Artinya, pendidikan akan menuntut segala kekuatan kodrat agar manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya. Dengan tuntunan manusia akan memiliki kecerdasan yang tinggi dan luas dan bisa menjauhkan dirinya dari pengaruh jahat dan buruk”.

Melalui statement tersebut Ki Hadjar Dewantara juga mengilustrasikan kalau mendidik manusia tidak jauh beda dengan petani yang menanam jagung. Pemeliharaan petani terhadap hasil panen tentu akan menghasilkan panen yang baik dan begitupun sebaliknya. Hal ini sepintas bisa diartikan bila dalam proses belajar mengajar tidak ada penanaman budi pekerti yang baik, bisa jadi panen yang dihasilkan kurang baik pula. Untuk itulah maka materi perpajakan perlu lebih dikaji lagi.

Secara ilmu pengetahuan bisa dikatakan ilmu pajak sebagai ilmu alat yang dapat diukur layaknya matematika. Ilmu tersebut pun dapat diukur layaknya matematika yang juga punya rumus dan dampaknya. Begitu juga dengan pajak, pajak bukanlah ilmu normatif tetapi dapat dirasakan secara langsung. Misalnya penerapan pajak yang baik mengakibatkan pembangunan yang sejahtera dan kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang tidak dirasakan oleh masyarakat selama ini. Banyak yang belum paham dikemanakan pemanfaatan uang pajaknya bahkan lebih parah lagi banyak yang tak sadar sebenarnya telah membayar pajak entah itu digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jembatan, sekolah, jalan dan lain sebagainya.

Kembali kepada ketiadaan nilai budi pekerti dalam pendidikan perpajakan di Wearnes Education Center, dalam jangka panjang akan memberikan akibat yang negatif. Para peserta didik akan menjadi manusia yang kurang berkarakter, karena menurut Ki Hadjar Dewantara hilangnya budi pekerti dalam diri manusia, dapat menjadikan yang bersangkutan kekurangan rasa cinta terhadap sesama.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu informan yaitu saudara EG menyampaikan;

“Menurut pendapat saya, penerapan etika dari sisi budi pekerti itu lebih mengacu pada karakter orang yang melakukan pekerjaan. Bukan mengacu pada pengambilan keputusan dalam pekerjaan itu sendiri. Etika memang diperlukan dalam segala bidang profesi, baik untuk subjek pajak maupun fiskus pajak itu sendiri. Masyarakat harus menyadari akan hak dan kewajibannya dengan menerapkan sistem self assesment system yaitu sistem yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada setiap wajib pajaknya untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. System ini akan menyadarkan wajib pajak akan semua kewajiban perpajakannya, memiliki kesadaran yang tinggi dan kejujuran dalam menghitung kewajiban pajaknya”.

Dari pengakuan tersebut saya mendapatkan gambaran bahwa nilai budi pekerti memiliki kekuatan dalam membentuk karakter peserta didik, untuk menjadikannya manusia yang beradab dan bersusila, seperti esensi dari ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai arti penting pengajaran budi pekerti dalam pendidikan. Seperti yang terekam dalam kalimat berikut ini:

“Tujuan pendidikan adalah memanusiaikan manusia, pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakat, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian”. (Ki Hadjar Dewantara,2016:86)

Dari kalimat di atas dapat diketahui bahwa manusia menjadi elemen penting dan harus memiliki budi pekerti yang luhur dan indah. Artinya materi perpajakan yang dikembangkan memiliki naluri dan sifat-sifat keindahan serta keluhuran. Maka dengan sendirinya peserta didik yang mempelajari materi perpajakan perlu memiliki keluhuran dan keindahan budi pekerti. Hal inilah yang menjadi subatansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai budi pekerti dalam pendidikan. Tidak salah memang kemampuan dan kompetensi merupakan hal yang penting, namun diperlukan internalisasi nilai-nilai budi pekerti agar pembentukan karakter calon pegawai pajak menjadi lebih kompleks dan utuh (holistik).

#### **4.4 Pendidikan Perpajakan dalam Bingkai Indikator Budi Pekerti Ki Hadjar Dewantara**

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan paradigma kritis Ki Hadjar Dewantara sebagai landasan pemikiran, untuk itu maka semua hal yang diteliti dan dirumuskan harus berdasarkan kerangka pemikir Ki Hadjar Dewantara. Temuan nilai-nilai yang telah saya paparkan dalam bab sebelumnya yang merupakan temuan awal bagaimana saya memaknai dari tulisan-tulisan beliau. Selain itu saya juga perlu memasukkan pernyataan-pernyataan dari informan hal ini dimaksudkan untuk menjustifikasi pemaknaan saya akan temuan nilai-nilai tersebut. Kemudian, saya mencoba merumuskan bagaimana tujuan pendidikan perpajakan yang sesuai dengan budi pekerti. Dari salah satu informan, yaitu saudara Ega Maulana, kepada saya berpendapat:

“Sebagai subjek pajak yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku yaitu yang pertama harus taat terhadap kewajiban dalam membayar pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran pajak yang telah ditentukan. Kemudian bersikap jujur, setiap pendapatan yang diterima harus sesuai dengan apa yang dilaporkan ke kantor pajak, dengan tidak mengurangi jumlah pendapatan. Selibuhnya yaitu saling menghormati, menanamkan kesadaran bahwasanya pajak itu penting tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum”.

Selain itu menurut Bapak TD, selaku fiskus dan pendidik pajak, ketika saya menanyakan mengenai figur Ki Hadjar Dewantara beliau juga menyatakan,

“ Ki Hadjar Dewantara memang salah satu penjuang yang tangguh, aktif di bidang pendidikan. Pengajaran beliau sesuai dengan karakter pendidikan itu sendiri yaitu memberikan pemahaman yang utuh. Tidak frontal dan bisa diterima oleh semua pihak. Memberikan nilai moral, etika secara utuh, tidak hanya cangkang luarnya saja.

Dari kalimat tersebut penulis bisa menangkap beberapa hal penting dari Ki Hadjar adalah kepemilikan karakter budi pekerti yang utuh, halus dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ki Hadjar Dewantara adalah seorang



pembelajar yang sejati. Ilmu yang diajarkan berasal dari pengalaman hidupnya kepada anak didiknya. Beliau juga memiliki kehalusan budi pekerti yang menyatu dengan sikap-sikap lainnya. Sejujurnya, ketika saya mencari beberapa literatur mengenai keterkaitan nilai budi pekerti dengan pendidikan perpajakan, saya mengalami kesulitan, karena berbagai penelitian tentang pendidikan perpajakan lebih dominan pada seputar perhitungan pajak.

Di sisi lain, dari sumber [www.Ddtc.com](http://www.Ddtc.com) menjelaskan sebagai berikut

“Sistem pendidikan pajak yang baik tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang melek pajak, namun juga ahli-ahli di bidang pajak yang akan menjadi lokomotif reformasi dan transformasi sistem pajak ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang. Walau demikian, perubahan arah sektor perpajakan di Indonesia dewasa ini akan berpengaruh secara langsung pada lonjakan permintaan atas ahli di bidang pajak. Momentum ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan pajak, khususnya perguruan tinggi”.

Dari pernyataan diatas, memang mengisyaratkan bahwa memang sebaiknya pendidikan perpajakan perlu direformasi. Bagaimana agar bingkai nilai budi pekerti Ki Hadjar Dewantara mewarnai pendidikan perpajakan demi terciptaya manusia yang berbudi pekerti luhur dengan bersatunya Tri-sakti (cipta,rasa,karsa) untuk mempertinggi derajat manusia. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan perpajakan mengarah pada keluhuran adab dan perilaku peserta didik saat memasuki dunia kerja dan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

#### **4.5 Ringkasan**

Secara garis besar, dari hasil penelusuran terhadap realitas pendidikan perpajakan di Wearnes Education Center dapat saya ambil kesimpulan bahwa sejauh ini nilai-nilai budi pekerti masih dilakukan secara implisit. Hal ini mengindikasi perlunya nilai budi pekerti kepada peserta didik selama proses pembelajaran materi perpajakan. Menurut saya apa yang menjadi cita-cita Ki

Hadjar Dewantara selama ini dalam membentuk karakter peserta anak didik yang berbudi pekerti luhur melalui proses pendidikan haruslah menjadi perjuangan yang berkelanjutan, artinya apapun materi yang diberikan, sudah seharusnya memiliki nilai budi pekerti di dalamnya.

Ki Hadjar Dewantara dalam pemikirannya mencerminkan nilai budi pekerti dalam keseimbangan Tri-sakti jiwa (cipta, rasa, karsa) semata-mata untuk mempertinggi derajat kemanusiaan peserta didiknya. Kondisi ini menjadi penyeimbang perkembangan nilai intelektualisme yang selama ini terbawa dari sistem pendidikan barat. Dengan demikian arti penting dari nilai budi pekerti dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan perpajakan yaitu terciptanya manusia yang berbudi luhur dengan bersatunya cipta, rasa dan karta dalam Tri-sakti jiwa semata-mata untuk mempertinggi derajat kemanusiaan, yang merupakan cita-cita luhur KHD dalam membentuk manusia yang beradab, mulia dan bersusila.